

PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMILU 2019 BAWASLU KOTA SALATIGA

TAHAPAN PENCALONAN

Dalam rangka persiapan pengawasan, Bawaslu melakukan pemetaan terlebih dahulu untuk memastikan fokus pengawasan yang akan menjadi titik pengawasan dan metode yang akan dilakukan. Secara teknis, fokus dan metode pengawasan telah diatur oleh Peraturan Bawaslu Nomor .. Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Umum. Akan tetapi berdasarkan hasil pemetaan yang telah dilakukan sebelumnya, fokus pengawasan Pengawas Pemilu dipertajam, sehingga fokus pengawasannya meliputi:

1. Persyaratan pencalonan calon Peserta Pemilu 2019;
2. Tata cara penentuan dan pengusulan peserta pemilu 2019;
3. Tata cara pendaftaran bakal calon peserta pemilu 2019;
4. Tata cara verifikasi persyaratan bakal calon peserta pemilu 2019;
5. Penetapan dan pengumuman peserta pemilu 2019; dan
6. Penggantian calon peserta pemilu 2019 yang berhalangan tetap.

Terhadap fokus pengawasan tersebut, Bawaslu melakukan pengawasan dengan menggunakan 2 metode, yaitu:

- (1) Metode observasi langsung terhadap proses pendaftaran bakal calon peserta pemilu 2019 dan manajemen verifikasi persyaratan;
- (2) Metode audit dokumen persyaratan bakal calon untuk menguji kebenaran dan validitas.

Adapun hasil pengawasan tahapan pencalonan ini adalah sbb:

KPU Kota Salatiga menetapkan partai politik peserta pemilu tahun 2019 yang dinyatakan lolos setelah melalui proses verifikasi sejumlah 12 (dua belas) yaitu

PKB (Partai Kebangkitan Bangsa),

PARTAI GERINDRA (Partai Gerakan Indonesia Raya),

PDI P (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan),

PARTAI GOLKAR (Golongan Karya),

NASDEM (Nasional Demokrat),

PARTAI GARUDA (Gerakan Perubahan Indonesia)

PARTAI BERKARYA (Beringin Karya),

PKS (Partai Keadilan Sejahtera),

PARTAI PERINDO (Persatuan Indonesia),

PPP (Partai Persatuan Pembangunan),

PSI (Partai Solidaritas Indonesia),

PAN (Partai Amanat Nasional),

PARTAI DEMOKRAT

Jumlah calon anggota legislative yang mendaftar di KPU : 276 (laki-laki 168, perempuan 108)

Jumlah calon anggota legislative yang ditetapkan KPU : 251 (laki-laki 147, Perempuan 104)

TAHAPAN MUTARLIH

Tahapan Pemutahiran Data dan Daftar pemilih pada Pemilu 2019 ini menjadi salah satu tahapan yang mendapat perhatian besar dari Bawaslu , hal ini mengingat masalah daftar pemilih adalah masalah laten yang selalu muncul pada setiap penyelenggaraan Pemilu. Bawaslu menyakini bahwa pada Pemilu 2019 , tahapan pendaftaran pemilih ini meskipun isunya kalah ramai dibanding isu pencalonan dan kampanye, tetap memiliki potensi kerawanan yang masih sangat tinggi.

Berdasarkan tahapan, program dan jadwal Pemilu Presiden dan Wakil Presidensebagaimana peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2014, tahapan pelaksanaan daftar pemilih Pemilu tahun 2019 dimulai dari tahapan penyusunan dan penetapan daftar pemilih sementara (DPS) yang datanya berasal dari Daftar pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018) di tambah dengan pemilih usia 17 tahun pada hari dan tanggal pemungutan suara, atau pemilih baru yang berasal dari Kementerian Dalam Negeri.

Selanjutnya dilakukan proses pemutakhiran data pemilih, kemudian pengumuman daftar pemilih sementara hasil pemutakhiran (DPSHP) untuk menerima tanggapan dan masukan masyarakat sebelum akhirnya ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap (DPT)

adapun rekapitulasi hasil pengawasan tahapan mutarlih pemilu 2019 adalah :

1. Jumlah pemilih yang ditetapkan pada Pleno DPS di Kota Salatiga:

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Jumlah Pemilih Laki-laki | : 64.434 pemilih |
| Jumlah Pemilih Perempuan | : 68.444 pemilih |
| Total Pemilih di DPS | : 132.878 pemilih |

2. Jumlah pemilih yang ditetapkan pada Pleno DPTHP1 di Kota salatiga :

| | |
|--------------------------------|--------------------------|
| Jumlah Pemilih Laki-laki | : 64.494 pemilih |
| Jumlah Pemilih Perempuan | : 68.525 pemilih |
| Total Pemilih di DPTHP1 | : 133.019 pemilih |

3. Jumlah pemilih yang ditetapkan pada Pleno DPTHP2 di Kota salatigaa:

| | |
|--------------------------------|--------------------------|
| Jumlah Pemilih Laki-laki | : 65.607 pemilih |
| Jumlah Pemilih Perempuan | : 69.879 pemilih |
| Total Pemilih di DPTHP2 | : 135.486 pemilih |

dan disempurnakan kembali dengan DPTHP2 Penyempurnaan dengan hasil sebagai berikut:

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Jumlah Pemilih Laki-laki | : 65.482 pemilih |
| Jumlah Pemilih Perempuan | : 69.667 pemilih |
| Total Pemilih di DPTHP2p | : 135.149 pemilih |

4. Jumlah pemilih yang TMS (Ganda, invalid, TNI, Polri, Pindah Domisili, Dibawah umur, Meninggal, Hilang ingatan, bukan penduduk, dicabut hak pilihnya):

Pemilih tidak memenuhi syarat yang terdapat pada penetapan DPTHP2 Penyempurnaan ada sejumlah **683** orang. TMS yang cukup banyak ini dikarenakan adanya pemilih yang berada di luar negeri yang pada hari Pemilihan (17 April 2019) tidak kembali/pulang ke Salatiga maka dari itu

KPU memutuskan untuk mencoret data pemilih dari DPTHP2 Penyempurnaan. Sisa data dari pemilih TMS meninggal dunia.

5. Jumlah pemilih disabilitas di Kota Salatiga:

Jumlah Pemilih Disabilitas Laki-laki : 158 pemilih

Jumlah Pemilih Disabilitas Perempuan : 157 pemilih

Total Pemilih Disabilitas di **DPTHP2p** : **315** pemilih

Dengan rincian :

Pemilih dengan disabilitas Tuna Daksa : 90 pemilih

Pemilih dengan disabilitas Tuna Netra : 53 pemilih

Pemilih dengan disabilitas Tuna Rungu : 54 pemilih

Pemilih dengan disabilitas Tuna Grahita : 65 pemilih

Pemilih dengan disabilitas lainnya : 53 pemilih

6. Jumlah Pemilih Baru di Kota Salatiga :

Jumlah Pemilih Baru laki-laki : 174 pemilih

Jumlah Pemilih Baru Perempuan : 172 pemilih

Total Pemilih Baru di **DPTHP2p** : **346** pemilih

7. Jumlah Pemilih Pemula yang terdaftar di DPTHP2p Kota Salatiga sejumlah 89 pemilih.

8. Jumlah rekomendasi terakhir yang diserahkan ke KPU Salatiga pada tahapan pemeliharaan DPTHP2:

Bawaslu Kota Salatiga Merekomendasi sejumlah **42 data**, dengan rincian sbb :

Pemilih meninggal dunia : 39 orang

Pemilih pindah domisili : 1 orang

Pemilih baru : 2 orang

Disamping proses tahapan tersebut, ada proses lagi yang terkait dengan tahapan pendaftaran pemilih ini adalah, pendaftaran pemilih yang masuk kategori pemilih tambahan (DPTb) atau yang disebut pemilih yang pindah TPS dengan syarat menggunakan formulir A5-PPWP, yang penyusunannya dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara serta pendaftaran pemilih yang masuk kategori DPK (daftar pemilih khusus) pada hari pemungutan suara

TAHAPAN KAMPANYE

Pengawasan tahapan kampanye secara garis besar bertujuan untuk memastikan Pertama, terselenggaranya kampanye Pemilu secara aman, tertib, damai, berdasarkan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab; Kedua, adanya perlakuan yang sama oleh penyelenggara Pemilu, Pemerintah dan pihak terkait lainnya terhadap masing-masing Peserta Pemilu, baik dari partai politik atau gabungan partai politik yang mengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam

mempersiapkan dan menyelenggarakan aktivitas kampanye; Ketiga, terselenggaranya pendidikan politik secara baik lewat penyampaian visi, misi, dan program dari masing-masing peserta pemilu; dan Keempat, menjamin terselenggaranya kampanye Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada beberapa metode kampanye sebagaimana diatur dalam PKPU kampanye diantaranya pemasangan APK, penyebaran Bahan Kampanye, Pertemuan Terbatas, Pertemuan Tatap Muka, Kampanye di medsos, Kampanye rapat umum, kampanye di media massa serta kampanye dalam bentuk lain yang bisa berupa kegiatan sosial, budaya, olahraga, perlombaan, bazar.

Salah satu obyek pengawasan tahapan kampanye adalah pelaksana, peserta dan petugas kampanye. Pengawas Pemilu memastikan bahwa orang-orang yang terlibat sebagai pelaksana dan tim kampanye bukanlah orang-orang yang masuk dalam pihak-pihak yang dilarang. Oleh karena itu salinan daftar pelaksana dan tim kampanye menjadi penting di miliki oleh Pengawas Pemilu, namun faktanya beberapa peserta masih belum secara menyeluruh mendaftarkan pihak-pihak yang berwenang melaksanakan kegiatan kampanye tersebut ke KPU. Aspek penting lainnya dari identifikasi pelaksana dan tim kampanye adalah untuk mengetahui ada tidaknya pejabat yang merupakan pihak yang dilarang berkampanye terdaftar. Hal ini penting karena Presiden dan Wakil Presiden serta pejabat Negara ketika menjadi pelaksana kampanye maupun tim kampanye harus mempunyai ijin cuti. Terkait ijin cuti pun, Pengawas Pemilu kesulitan untuk mendapatkannya dan harus bersikap proaktif dengan mengirimkan surat.

Adapun rekapitulasi kegiatan pengawasan kampanye peserta pemilu 2019 di kota salatiga adalah:

JUMLAH KEGIATAN KAMPANYE

| NO | NAMA PARPOL | JUMLAH KAMPANYE | | | | |
|---------------------|----------------|-----------------|-----------|----------|-----------|------------|
| | | PT | TM | RU | GIAT LAIN | JUMLAH |
| 1 | PKB | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | GERINDRA | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 3 | PDI PERJUANGAN | 12 | 12 | 0 | 1 | 25 |
| 4 | GOLKAR | 2 | 3 | 0 | 5 | 10 |
| 5 | NASDEM | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | GARUDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | BERKARYA | 4 | 9 | 0 | 0 | 13 |
| 8 | PKS | 1 | 7 | 0 | 1 | 9 |
| 9 | PERINDO | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 10 | PPP | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | PSI | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 12 | PAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | DEMOKRAT | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| 1 | PASLON 01 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 2 | PASLON 02 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 |
| JUMLAH TOTAL | | 35 | 58 | 2 | 10 | 105 |

Keterangan:

PT = Pertemuan Terbatas

TM= Tatap Muka

RU= Rapat Umum

APK MELANGGAR

| NO | NAMA PARPOL | JENIS APK MELANGGAR | | | | | | JUMLAH |
|---------------------|-------------|---------------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|---------------|
| | | BALIHO | BANNER | SPANDUK | POSTER | STIKER | LAIN-LAIN | |
| 1 | PKB | 112 | 799 | 60 | 127 | 21 | 34 | 1.153 |
| 2 | GERINDRA | 53 | 226 | 13 | 0 | 0 | 28 | 320 |
| 3 | PDI P | 163 | 2.631 | 112 | 977 | 347 | 104 | 4.334 |
| 4 | GOLKAR | 32 | 184 | 10 | 107 | 213 | 143 | 689 |
| 5 | NASDEM | 50 | 334 | 115 | 59 | 0 | 0 | 558 |
| 6 | GARUDA | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 7 | BERKARYA | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 8 | PKS | 112 | 799 | 60 | 127 | 21 | 34 | 1.153 |
| 9 | PERINDO | 30 | 321 | 42 | 47 | 4 | 20 | 464 |
| 10 | PPP | 16 | 120 | 7 | 12 | 0 | 0 | 155 |
| 11 | PSI | 6 | 59 | 37 | 0 | 0 | 0 | 102 |
| 12 | PAN | 32 | 128 | 9 | 58 | 0 | 0 | 227 |
| 13 | DEMOKRAT | 64 | 454 | 7 | 152 | 0 | 27 | 704 |
| 1 | PASLON 01 | 14 | 132 | 5 | 0 | 0 | 0 | 151 |
| 2 | PASLON 02 | 3 | 4 | 20 | 0 | 18 | 0 | 45 |
| JUMLAH TOTAL | | 687 | 6.262 | 497 | 1.666 | 624 | 390 | 10.126 |

TAHAPAN DANA KAMPANYE

Isu pendanaan selalu menjadi hal yang sensitif dan mengundang perhatian (interest) publik yang besar. Hal ini disebabkan oleh dekatnya isu pendanaan dengan korupsi. Secara konseptual, isu dana kampanye memang sangat erat kaitannya dengan korupsi atau korupsi Pemilu. Hal ini tidak hanya merusak demokrasi tetapi juga menghancurkan nilai dan etika politik di tingkat masyarakat terlebih lagi di tingkat elit politik.

Bawaslu melakukan pengawasan terhadap dokumen laporan sumbangan dana kampanye dari sisi ketepatan waktu pelaporan dan keterpenuhan prosedur serta kesuaian penerimaan laporan sumbangan dana kampanye. Proses pemantauan ini bermaksud untuk memastikan terjadinya pelaporan penggunaan dana kampanye selama proses kegiatan kampanye Pemilu yang bersifat legal, akuntabel dan transparan. Bagi calon kandidat presiden dan wapres harus mampu untuk mengelola dan mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye mereka ke publik.

Pelaksanaan pengawasan laporan dana kampanye ini mencakup, LADK, Penyerahan LPSDK, Penyerahan LPPDK, Penyerahan hasil audit KPU.

adapaun hasil pengawasan tahapan dana kampanye adalah :

| NO | PARTAI POLITIK | JENIS (RP) | | | TOTAL |
|----|----------------|---------------|---------------|-------------------|----------------|
| | | UANG | BARANG | JASA | |
| 1 | PKB | Rp - | Rp 9.500.000 | Rp 13.937.245 | Rp 23.437.245 |
| 2 | GERINDRA | Rp - | Rp - | Rp 165.848.650,00 | Rp 165.848.650 |
| 3 | PDIP | Rp - | Rp - | Rp 401.020.865 | Rp 401.020.865 |
| 4 | GOLKAR | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - |
| 5 | NASDEM | Rp 8.000.000 | Rp 2.475.000 | Rp 58.565.600 | Rp 69.040.600 |
| 6 | GARUDA | Rp - | Rp - | Rp - | Rp - |
| 7 | BERKARYA | Rp - | Rp - | Rp 7.498.700 | Rp 7.498.700 |
| 8 | PKS | Rp 25.000.000 | Rp 76.346.700 | Rp - | Rp 101.346.700 |
| 9 | PERINDO | Rp 1.800.000 | Rp 135.000 | Rp 207.254.570 | Rp 209.189.570 |

| | | | | | |
|---------------|----------|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 10 | PPP | Rp - | Rp - | Rp 9.307.600 | Rp 9.307.600 |
| 11 | PSI | Rp - | Rp - | Rp 18.330.000 | Rp 18.330.000 |
| 12 | PAN | Rp 9.300.000 | Rp - | Rp - | Rp 9.300.000 |
| 13 | HANURA | | | | Rp - |
| 14 | DEMOKRAT | Rp 4.575.000 | Rp - | Rp 62.085.380 | Rp 66.660.380 |
| 19 | PBB | | | | Rp - |
| 20 | PKPI | | | | Rp - |
| JUMLAH | | Rp 48.675.000 | Rp 88.456.700 | Rp 944.028.610 | Rp 1.081.160.310 |

TAHAPAN KELENGKAPAN LOGISTIK

Berdasarkan hasil evaluasi pengawasan produksi dan distribusi logistik Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD 2019, terdapat banyak hal kecarut-marutan yang terjadi dalam pelaksanaan non tahapan Pemilu ini. Mulai dari tertutupnya proses produksi logistik Pemilu, logistik Pemilu yang kurang, rusak dan bahkan tidak sampai ke tujuan adalah variable-variabel yang menunjukkan kecarut-marutan tersebut. Namun demikian, tentu saja buruknya kualitas manajemen KPU ini sedikit banyak menjadi catatan kritis Pengawas Pemilu yang mau tidak mau menjadi bagian dari buruknya manajemen produksi dan distribusi logistik Pemilu.

Berikut hasil pengawasan kelengkapan logistic pemilu 2019

SURAT SUARA

| No | SURAT SUARA | JUMLAH | | KEKURANGAN | | | |
|----|---------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | KEBUTUHAN (DPT +2%PER TPS) | DITERIMA DARI REKAMAN KPU RI | KURANG KEBUTUHAN AWAL* | KARENA SELISIH HITUNG** | TIDAK LOLOS SORTIR*** | JUMLAH TOTAL KEKURANGAN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | PPWP | 138.153 | 137.181 | 972 | 0 | 79 | 1.051 |
| 2 | DPD | 138.153 | 137.852 | 301 | 0 | 335 | 636 |
| 3 | DPR RI | 138.153 | 137.772 | 381 | 0 | 1.058 | 1.439 |
| 4 | DPRD Prov | 138.153 | 137.935 | 218 | 0 | 680 | 898 |
| 5 | DPRD Kab/Kota | 138.153 | 137.659 | 494 | 0 | 1.193 | 1.687 |
| | ➤ Dapil 1 | 31.792 | 31.664 | 128 | 0 | 258 | 386 |
| | ➤ Dapil 2 | 39.487 | 39.240 | 247 | 0 | 496 | 743 |
| | ➤ Dapil 3 | 32.815 | 32.770 | 45 | 0 | 86 | 131 |
| | ➤ Dapil 4 | 34.059 | 33.985 | 74 | 0 | 353 | 427 |
| | JUMLAH TOTAL | 690.765 | 688.399 | 2.366 | 0 | 3.345 | 5.711 |

SURAT SUARA TAMBAHAN

| TAMBAHAN | JUMLAH KEKURANGAN |
|---------------|----------------------|
| 301 | 750 |
| 257 | 379 |
| 301 | 1.138 |
| 301 | 597 |
| 300 | 1.387 |
| 68 | 318 |
| 92 | 651 |
| 65 | 66 |
| 75 | 352 |
| JUMLAH | 5.638 |

KOTAK BILIK SEGEL TINTA FORM

| No | JENIS LOGISTIK | JUMLAH TOTAL KEBUTUHAN* | TERSEDIA/ DITERIMA DARI REKANAN KPU | KEKURANGAN |
|----|----------------------|----------------------------|--|------------|
| 1 | Kotak suara | 3.114 | 3.114 | 0 |
| 2 | Bilik | 1.228 | 1.228 | 0 |
| 3 | Segel | 42.980 | 42.980 | 0 |
| 4 | Tinta | 1.228 | 1.228 | 0 |
| 5 | Set Formulir Model C | 614 | 614 | 0 |

TAHAPAN DISTRIBUSI LOGISTIK

Dalam pelaksanaan pengawasan distribusi, Bawaslu RI telah memerintahkan Bawaslu Provinsi untuk melakukan supervisi di Kabupaten/Kota masing-masing diwilayahnya dalam pelaksanaan sortir surat suara di KPU Kabupaten/Kota. Selain itu, Bawaslu RI lalu memerintahkan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk melakukan pengawasan melekat pelaksanaan sortir surat suara tersebut.

Beberapa permasalahan dalam pengawasan tahapan distribusi logistik

- a. Jadwal tak menentu
- b. Kekurangan Logistik
- c. Kurangnya fasilitas Keamanan
- d. SDM Baru ditengah tahapan

TAHAPAN PUNGUT HITUNG

| No | Nama Kecamatan | Jumlah kelurahan | Jumlah TPS | Jumlah KPPS | Jumlah PTPS |
|----|----------------|------------------|------------|-------------|-------------|
| 1 | Sidomukti | 4 | 138 | 966 | 138 |
| 2 | Sidorejo | 6 | 181 | 1267 | 181 |
| 3 | Tingkir | 7 | 138 | 966 | 138 |
| 4 | Argomulyo | 6 | 157 | 1099 | 157 |
| | | 23 | 614 | 4298 | 614 |

TAHAPAN REKAPITULASI**KEC.SIDOMUKTI**

| NO | NAMA PARPOL | Perolehan | PEMBAGIAN | | | Kursi ke | |
|----|-------------|-----------|-----------|-------|------|----------|---------------------|
| | | | 1 | 3 | 5 | | |
| 1 | PKB | 2883 | 2883 | 961 | 577 | 4 | FATONI |
| 2 | GERINDRA | 2428 | 2428 | 809.3 | 486 | 6 | AGUS P |
| 3 | PDIP | 12220 | 12220 | 4073 | 2444 | 1,2,5 | TEDDY,BAGAS,FARDILA |
| 4 | GOLKAR | 402 | 402 | 134 | 80.4 | | |
| 5 | NASDEM | 231 | 231 | 77 | 46.2 | | |
| 6 | GARUDA | 86 | 86 | 28.67 | 17.2 | | |
| 7 | BERKARYA | 55 | 55 | 18.63 | 11 | | |
| 8 | PKS | 3323 | 3323 | 1108 | 665 | 3 | MAMAN |
| 9 | PERINDO | 124 | 124 | 41.33 | 24.8 | | |
| 10 | PPP | 2311 | 2311 | 770.3 | 462 | | |
| 11 | PSI | 800 | 800 | 266.7 | 160 | | |
| 12 | PAN | 912 | 912 | 304 | 182 | | |
| 13 | HANURA | 8 | 8 | 2.667 | 1.6 | | |
| 14 | DEMOKRAT | 1162 | 1162 | 387.3 | 232 | | |
| 15 | PBB | 13 | 13 | 4.33 | 2.6 | | |
| 16 | PKPI | 7 | 7 | 2.2 | 1.4 | | |

KECAMATAN SIDOREJO

| NO | NAMA PARPOL | Perolehan | PEMBAGIAN | | | Kursi ke | |
|----|-------------|-----------|-----------|-------|------|----------|--------------|
| | | | 1 | 3 | 5 | | |
| 1 | PKB | 4339 | 4339 | 1446 | 868 | 2 | BASIRIN |
| 2 | GERINDRA | 2586 | 2586 | 862 | 517 | 7 | ASLINDA |
| 3 | PDIP | 8862 | 8862 | 2954 | 1772 | 1,6 | BONAR,SARMIN |
| 4 | GOLKAR | 2093 | 2093 | 697.7 | 419 | | |
| 5 | NASDEM | 3739 | 3739 | 1246 | 748 | 4 | YUSUF |
| 6 | GARUDA | 73 | 73 | 24.33 | 14.6 | | |
| 7 | BERKARYA | 135 | 135 | 45 | 27 | | |
| 8 | PKS | 3931 | 3931 | 1310 | 786 | 3 | LATIF |
| 9 | PERINDO | 1136 | 1136 | 378.7 | 227 | | |
| 10 | PPP | 1031 | 1031 | 343.7 | 206 | | |
| 11 | PSI | 259 | 259 | 86.33 | 51.8 | | |
| 12 | PAN | 505 | 505 | 168.3 | 101 | | |
| 13 | HANURA | 9 | 9 | 3 | 1.8 | | |
| 14 | DEMOKRAT | 3683 | 3683 | 1228 | 737 | 5 | DIAH |
| 15 | PBB | 18 | 18 | 6 | 3.6 | | |
| 16 | PKPI | 10 | 10 | 3.333 | 2 | | |

KECAMATAN TINGKIR

| NO | NAMA PARPOL | Perolehan | PEMBAGIAN | | | Kursi ke | |
|----|-------------|-----------|-----------|-------|------|----------|------------|
| | | | 1 | 3 | 5 | | |
| 1 | PKB | 2553 | 2553 | 851 | 511 | 5 | MIFTAH |
| 2 | GERINDRA | 3997 | 3997 | 1332 | 799 | 2 | WORD |
| 3 | PDIP | 10113 | 10113 | 3371 | 2023 | 1,4 | DANCE,NOVI |
| 4 | GOLKAR | 769 | 769 | 256.3 | 154 | | |
| 5 | NASDEM | 1706 | 1706 | 568.7 | 341 | | |
| 6 | GARUDA | 80 | 80 | 26.67 | 16 | | |
| 7 | BERKARYA | 41 | 41 | 13.67 | 8.2 | | |
| 8 | PKS | 2334 | 2334 | 778 | 467 | 6 | NONO |
| 9 | PERINDO | 971 | 971 | 323.7 | 194 | | |
| 10 | PPP | 194 | 194 | 64.67 | 38.8 | | |
| 11 | PSI | 205 | 205 | 68.33 | 41 | | |
| 12 | PAN | 258 | 258 | 86 | 51.6 | | |
| 13 | HANURA | 2 | 2 | 0.667 | 0.4 | | |
| 14 | DEMOKRAT | 3842 | 3842 | 1281 | 768 | 3 | DAYAT |
| 15 | PBB | 14 | 14 | 4.667 | 2.8 | | |
| 16 | PKPI | 6 | 6 | 2 | 1.2 | | |

KECAMATAN ARGOMULYO

| NO | NAMA PARPOL | Perolehan | PEMBAGIAN | | | Kursi ke | |
|----|-------------|-----------|-----------|-------|------|----------|-----------|
| | | | 1 | 3 | 5 | | |
| 1 | PKB | 2982 | 2982 | 994 | 596 | 5 | SAEFUL |
| 2 | GERINDRA | 2976 | 2976 | 992 | 595 | 6 | SARWONO |
| 3 | PDIP | 7530 | 7530 | 2510 | 1506 | 1 | KEMAT |
| 4 | GOLKAR | 3857 | 3857 | 1286 | 771 | 3 | LISTYANTO |
| 5 | NASDEM | 305 | 305 | 101.7 | 61 | | |
| 6 | GARUDA | 147 | 147 | 49 | 29.4 | | |
| 7 | BERKARYA | 86 | 86 | 28.67 | 17.2 | | |
| 8 | PKS | 3924 | 3924 | 1308 | 785 | 2 | BUDI |
| 9 | PERINDO | 209 | 209 | 69.67 | 41.8 | | |
| 10 | PPP | 2187 | 2187 | 729 | 437 | | |
| 11 | PSI | 494 | 494 | 164.7 | 98.8 | | |
| 12 | PAN | 584 | 584 | 194.7 | 117 | | |
| 13 | HANURA | 7 | 7 | 2.333 | 1.4 | | |
| 14 | DEMOKRAT | 3068 | 3068 | 1023 | 614 | 4 | AGUS J |
| 15 | PBB | 14 | 14 | 4.667 | 2.8 | | |
| 16 | PKPI | 8 | 8 | 2.667 | 1.6 | | |

PEROLEHAN SUARA PILPRES

| NO | KECAMATAN | PASLON 01 | PROSENTASE | PASLON 02 | PROSENTASE |
|----|-----------|-----------|------------|-----------|------------|
| 1 | SIDOMUKTI | 21.644 | 78,4 % | 6.354 | 21,6 % |
| 2 | SIDOREJO | 26.504 | 77,3 % | 7.590 | 22,7 % |
| 3 | TINGKIR | 22.729 | 77,7 % | 6.086 | 22,3 % |
| 4 | ARGOMULYO | 23.850 | 78,4 % | 6.565 | 21,6 % |
| | JUMLAH | 94.727 | 78,14 % | 26.595 | 21,86 % |

DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH

| No | Data Pemilih | Sidomukti | Sidorejo | Tingkir | Argomulyo | |
|----|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 1 | Jml Pemilih DPT | 31.101 | 38.622 | 32.109 | 33.317 | |
| | Jml Pemilih DPTb | 768 | 1233 | 670 | 429 | |
| | Jml Pemilih DPK | 468 | 633 | 761 | 853 | |
| | JUMLAH | 32.337 | 40.488 | 33.540 | 34.599 | |
| 2 | Pengguna Hak Pilih | | | | | |
| | Dalam DPT | 27.628 | 33.376 | 28.137 | 30.000 | |
| | Dalam DPTb | 9 | 15 | 4 | 20 | |
| | Dalam DPK | 468 | 633 | 761 | 853 | |
| | JUMLAH | 28.105 | 34.024 | 28.902 | 30.873 | |
| 3 | Jumlah Pemilih Disabilitas | | | | | |
| | Terdaftar Dalam DPT,DPTb,DPK | 72 | 84 | 68 | 43 | |
| | Disabilitas Pengguna Hak Pilih | 37 | 56 | 35 | 36 | |
| 4 | Penggunaan Surat Suara | | | | | |
| | Diterima termasuk Cadangan 2% DPT | 31.814 | 39.463 | 32.766 | 34.106 | |
| | Dikembalikan karena rusak/keliru coblos | 52 | 69 | 75 | 69 | |
| | Tidak digunakan/tidak terpakai trmasuk sisa cadangan | 3657 | 5370 | 3789 | 3164 | |
| | Jumlah digunakan | 28.105 | 34.024 | 28.902 | 30.873 | |
| 5 | Suara Sah dan Tidak Sah | | | | | |
| | Suara Sah | 26.965 | 32.410 | 27.582 | 29.534 | |
| | Tidak Sah | 1140 | 1614 | 1320 | 1339 | |
| | Jumlah Suara Sah & Tidak Sah | 28.105 | 34.024 | 28.902 | 30.873 | |